

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi, reformasi, dan tuntutan transparansi yang semakin meningkat, peran akuntansi semakin dibutuhkan, tidak saja untuk kebutuhan pihak manajemen suatu entitas tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban (accountability) kepada banyak pihak yang memerlukan. Hal ini ditunjang oleh semakin berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk menilai dan membandingkan suatu entitas dengan entitas lain, untuk itu tuntutan penyediaan informasi termasuk informasi keuangan dan akuntansi semakin dibutuhkan. Selain perusahaan swasta, peran akuntansi dibutuhkan juga oleh instansi pemerintahan. Hal ini dimaksud agar pengelolaan keuangan instansi pemerintahan semakin baik. Instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya reformasi dan pengembangan, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan yang berkesinambungan sangat diperlukan sehingga terbentuk suatu sistem yang tepat. (Mardiasmo,2004)

Perkembangan akuntansi pemerintahan tidaklah secepat akuntansi bisnis. Salah satu penyebabnya adalah karakteristik akuntansi pemerintahan yang tidak banyak mengalami perubahan. Akhir-akhir ini tuntutan masyarakat terhadap

kinerja pemerintah menjadikan pentingnya akuntansi pemerintahan ini. Semakin besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka semakin besar pula tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang semakin efektif. Pada akuntansi sektor publik, segala keputusan tentang perencanaan dan perealisasi akan tercermin dalam laporan dan realisasi APBN.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah

(PP No. 24 tahun 2005 yang telah direvisi menjadi PP No. 71 tahun 2010) antara lain : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan penerapan standar akuntansi, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan, yaitu : “Standar Akuntansi Pemerintahan, Selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia”. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di Pemerintahan.

Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mempunyai pilihan 2 basis, yaitu SAP berbasis AkruaI dan SAP berbasis Kas Menuju AkruaI. Penerapan SAP berbasis AkruaI dalam lingkungan Pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan untuk kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Dengan adanya SAP berbasis akruaI ini dapat menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang bersifat relevan, andal, dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik.(Riani Nurhayati 2013).

Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan diterapkan standar akuntansi pemerintah yang baik, maka pemerintah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Penelitian mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan telah dilakukan oleh Susilawati (2014) dan Agustian (2012). Susilawati 2014 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 13%, namun tidak signifikan. Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah sebesar 74.6%. Sedangkan Agustian (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Melalui penguatan sistem pengendalian internal, diharapkan upaya perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih dipacu lagi. Selain itu penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian Negara. Penelitian mengenai penerapan sistem pengendalian internal sebelumnya pernah dilakukan oleh Kartika Indriya (2013) ,dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.

Dalam menyusun laporan keuangan diperlukan kompetensi yang baik dari staf akuntansi. Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau existensi suatu organisasi dalam satu

periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut. Desiana (2012) dengan judul penelitian pengaruh dukungan pimpinan dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas informasi keuangan, membuktikan bahwa dukungan pemimpin tidak berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan sedangkan kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan daerah namun tidak signifikan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ari (2014) yang berjudul pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Buleleng. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa

penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan dipilihnya objek penelitian di instansi pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi karena berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kabupaten Kuantan Singingi TA 2014. Opini ini sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Kabupaten Kuantan Singingi pada TA 2012 dan TA 2013. Namun, walaupun Kabupaten Kuantan Singingi memperoleh opini WTP tetapi masih terdapat beberapa kelemahan yang ditemukan oleh BPK yaitu kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah (<http://pekanbaru.bpk.go.id>).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Bagaimana pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
4. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

“Untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi”

2. Manfaat penelitian

- a. Bagi umum, sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan.
- b. Bagi praktisi, membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi daerah pada masa yang akan datang.

- c. Bagi peneliti, memberikan wawasan serta wacana kepada pihak SKPD dalam mengembangkan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi akuntabilitas keuangan.
- d. Bagi akademis, dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintahan di daerah pada khususnya.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, maka penulis membagi kedalam enam bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama dari skripsi ini menguraikan secara singkat mengenai isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan dalam landasan pembahasan dan pemecahan masalah serta berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan berbagai hal, diantaranya sampel penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, metode penelitian serta metodologi analisis yang digunakan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN (OBJEK PENELITIAN)

Bab ini membahas mengenai gambaran umum SKPD yang ada di Kab. Kuansing.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kab. Kuansing.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup dari penulisan skripsi, yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan.